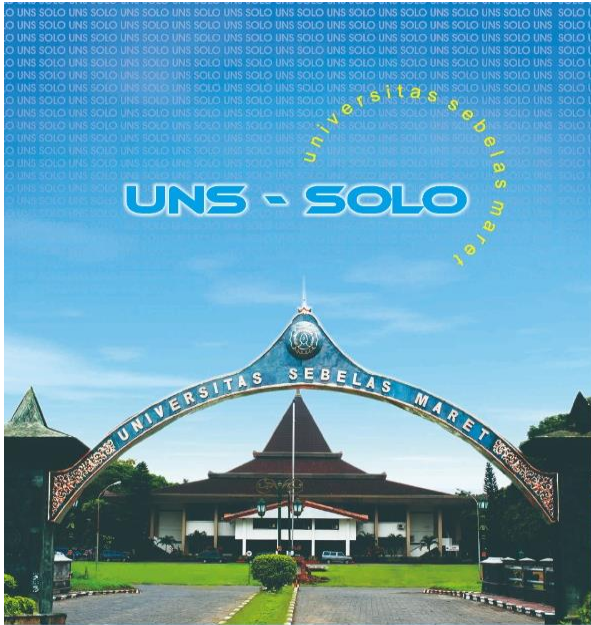


Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter



www.uns.ac.id

INTEGRASI PANCASILA PADA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN WARGA INDONESIA YANG BERKARAKTER



Pidato Pengukuhan Guru Besar
Bidang Ilmu Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret

Disampaikan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik
Universitas Sebelas Maret
20 Desember 2024

Oleh :
Prof. Dr. Winarno, S.Pd., M.Si.

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2024



Prof. Dr. Winarno, S.Pd., M.Si.

Guru Besar Bidang Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret



Dicetak di:
 Sebelas Maret University Press
(UNS PRESS), Desember 2024
Isi diluar tanggung jawab pencetak

INTEGRASI PANCASILA
PADA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN WARGA INDONESIA
YANG BERKARAKTER

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan ...

Yang saya hormati,

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret

Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Senat Akademik Universitas Sebelas Maret

Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret

Para Pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret

Para Pimpinan Lembaga, Direktorat, UPT, serta seluruh pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Para Kepala Program Studi, Kepala Bagian, Ketua Laboratorium di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Para Rekan Sejawat, Dosen, Staf Kependidikan, dan Mahasiswa, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, lebih khusus lagi Program Studi PPKn

Para kolega, mitra, pimpinan prodi PPKn sejawat, asosiasi AP3KnI, ISPI, AKD MKWK SI, dan Ikatan Alumni,

Para Tamu Undangan, Sanak Keluarga, Handai Taulan, Wartawan, serta hadirin yang berbahagia

Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wataala yang telah memberikan karunia, rahmat, dan berkah-Nya kepada kita semua karena kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat.

Hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul **“Integrasi Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter”**. Dari judul ini, saya akan menyajikan 5 (lima) bahasan, yaitu (1) Hakekat dan Pentingnya Pancasila, (2) Kompetensi, Isi dan Area Pendidikan Kewarganegaraan (3) Integrasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan, (4) Indeks Karakter Warga negara ,dan (5) Simpulan.

A. Hakekat dan Pentingnya Pancasila

Apakah itu Pancasila? Pertanyaan ini mungkin sudah biasa dan sesungguhnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun dengan semakin banyaknya warga Indonesia mau berbicara Pancasila akan semakin kokohlah Pancasila di Indonesia ini.

Oleh karena itu, di forum terhormat dan yang mulia ini, saya sebagai bagian kecil dari pendidik bidang Pancasila dan kewarganegaraan, mengajak terus generasi muda untuk belajar tentang Pancasila, belajar ber- Pancasila dan belajar untuk Pancasila.

1. Pengertian dan Hakekat Pancasila

Hadirin yang kami muliakan,

Pengertian Pancasila menurut Notonagoro dalam Pidato Dies Natalis di Universitas Pancasila tanggal 8 Nopember 1967 mencakup persoalan tentang rumus dan isi Pancasila. Rumus Pancasila adalah kedudukannya dalam bangunan negara bangsa Indonesia. Rumus ini perlu diberi penjelasan tentang muatan yang terkandung didalamnya atau perlu diberikan “isi”. Rusli Karim (1998) menyebut bicara Pancasila berfokus pada dua hal yakni makna penting Pancasila dan kandungan Pancasila itu sendiri. Masalah status dan muatan Pancasila ini terdapat keragaman pemikiran yang juga dapat menimbulkan persoalan tentang status dan muatan apa dari Pancasila yang seharusnya diimplementasikan dalam praktik pendidikan kita.

Adian Huzaini (2009) menyatakan di era reformasi ini pembicaraan tentang Pancasila justru melahirkan satu Pancasila dengan beragam tafsir. Bahkan menurut Eka Darmaputra (1997), setiap kelompok boleh memiliki penafsiran sendiri-sendiri terhadap Pancasila, penafsiran tunggal tidaklah mungkin dan apabila dipaksakan justru akan bertentangan dengan maksud dan jiwa asli Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap keragaman pengertian dan kedudukan Pancasila, Kaelan (2002) menyatakan bahwa pengertian, kedudukan, dan fungsi Pancasila itu masing-masing harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Ada yang menyebut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum negara, pemersatu bangsa dan sebagainya. Namun dari keragaman pendapat tersebut terdapat penerimaan pandangan yang sama bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya pemikiran di jalur yuridis kenegaraan bahwa ... negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ... (penggalan alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945) disepakati bahwa lima nilai itu berkedudukan sebagai dasar negara. Hal ini diperkuat juga melalui Ketetapan MPR RI No XVIII/MPR/1998. Meskipun kata “Pancasila” tidak ada di Pembukaan UUD NRI 1945, tetapi berdasar interpretasi historis, lima nilai itu bernama Pancasila.

Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya mengenai isi, kandungan atau muatan yang termuat di masing masing sila atau nilai Pancasila itu sendiri juga terdapat keragaman pendapat dan penjelasan. Misal, sesungguhnya apakah makna atau isi dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab?

Pemikiran mengenai isi atau muatan dari Pancasila menunjukkan pula adanya keragaman. Menurut Pranarka (1985), pemikiran yang beragam ini dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 1) pemikiran ideologis, 2) pemikiran ilmiah, 3) pemikiran filosofis, dan 4) pemikiran teologis. Pemikiran ilmiah, filosofis, dan teologis mengenai Pancasila termasuk pemikiran akademis yang bersifat reflektif, obyektif, kritis, logis, dan sistematis. Pemikiran ideologis bukan

termasuk pemikiran akademis, oleh karena pendekatan ideologis mengenai Pancasila adalah uraian yang tidak mempersoalkan konsistensi akan substansi, tidak memperhitungkan “nilai kebenaran internal”, tetapi lebih menitik beratkan pada tujuan konkrit sebagai motivasi utamanya.

Selanjutnya, Pranarka (1985) juga mengemukakan adanya dua jalur pemikiran mengenai Pancasila, yakni pemikiran yang berkembang dalam jalur politik kenegaraan di satu pihak dan pemikiran mengenai Pancasila yang berkembang dalam jalur akademis di lain pihak. Pemikiran mengenai Pancasila melalui jalur politik kenegaraan adalah pemikiran yang bersumberkan pada rumusan Pancasila yang diletakkan pada hukum kenegaraan Indonesia. Pemikiran ini diwujudkan dalam bentuk ketetapan politik kenegaraan, sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan perundangan yang lain. Pemikiran yang berkembang di jalur akademis adalah pemikiran yang dikembangkan oleh para ahli maupun pemikir, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Pemikiran akademis meliputi pemikiran ilmiah, filosofis dan teologis.

Adanya heterogenitas pendekatan terhadap Pancasila ini dapat mengakibatkan pertumbuhan yang kaya akan kepustakaan Pancasila, tetapi sekaligus membawa suasana yang mengandung *perpleksitas* intelektual (Pranarka, 1985). Bahkan keragaman ini dianggap sebagai salah satu ciri khas Pancasila, bahwa ia memberikan tempat bagi bermacam-macam cara pendekatan dan penafsiran (Eka Darmaputra, 1997).

Berdasar pemikiran di atas, tentu dalam pengimplementasian Pancasila, misal melalui jalur pendidikan, menimbulkan pertanyaan. Rumus dan isi daripada Pancasila yang manakah yang sebaiknya dibelajarkan kepada generasi muda kita?

2. Pentingnya Pancasila

Menurut Mohammad Hatta (1960, 1966) Pancasila adalah suatu ideologi yang diperuntukkan sebagai dasar negara. Apa itu ideologi dan apa pentingnya ideologi?

Hadirin yang kami mulikan,

Bagi masyarakat dunia ketiga seperti halnya Indonesia, persoalan ideologi menjadi salah satu dari tiga masalah pokok bersama, yakni masalah integrasi nasional, masalah ketertiban dan stabilitas politik, dan masalah ideologi itu sendiri. Eka Darmaputra (1997) menyatakan bahwa masalah ideologi berkaitan dengan bagaimana menciptakan dan menemukan ideologi yang tepat guna yang mampu mempersatukan seluruh rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian ideologi adalah sesuatu yang penting bagi sebuah bangsa oleh karena ia memberi kejelasan identitas nasional, kebanggaan, dan kekuatan yang bisa mengilhami untuk mencapai cita-cita sosial dan politik (Faisal Ismail, 1999).

Clifford Geertz (Yahya Muhaimin dan Collin Mc Andrew, 1982) memasukkan Indonesia sebagai negara bangsa baru yang memiliki dua jenis motif yang kuat dan saling mempengaruhi, berbeda satu sama lain, dan seringkali bertentangan, yakni pertama, usaha mencari identitas (kepribadian) sebagai sesuatu yang penting untuk

“menjadi seseorang di dunia” dan dua, kehendak untuk menciptakan suatu negara yang efisien dan dinamis. Motif pertama, berkaitan dengan tuntutan identitas-identitas lokal dan primordial agar diakui sebagai identitas dalam sebuah negara bangsa, sedang motif kedua keinginan membentuk negara bangsa yang mengatasi identitas-identitas tersebut. Oleh karena itu menurut Eka Darmaputra (1997), sebuah negara bangsa baru membutuhkan ‘identitas baru’ yang mesti dilahirkan dengan mempertimbangkan dua kenyataan di atas. Identitas baru ini mampu memayungi dan tidak bertentangan dengan identitas yang telah ada serta mampu menciptakan persatuan guna mewujudkan negara bangsa yang efektif dan efisien.

Kebutuhan akan suatu ideologi dan identitas baru yang mampu mempersatukan masyarakat di bawah satu kekuasaan politik negara bangsa, dalam sejarah pergerakan Indonesia telah dilakukan melalui pembicaraan para *the founding fathers* pada masa sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua antara tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. BPUPKI memiliki dua tugas pokok, yakni 1) merumuskan dasar-dasar Indonesia merdeka dan 2) menetapkan undang-undang dasar (Silalahi, 2001).

Kebutuhan akan suatu ideologi dan identitas bersama di Indonesia pada akhirnya telah terpenuhi melalui proses panjang pembicaraan para *the founding fathers* bangsa sejak masa sidang I BPUPKI, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, masa sidang II BPUPKI sampai ditetapkannya Pembukaan UUD NRI 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila dasar negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ideologi ini bernama Pancasila. Perihal ini, Eka Darmaputra (1997) mengemukakan bahwa dengan adanya Pancasila ini telah tercapai upaya untuk mencari identitas baru maupun untuk mencapai kesepakatan nilai di Indonesia. George MT Kahin (1995) menyatakan Pancasila dari Ir. Soekarno akan dapat membimbing dan memenuhi syarat sebagai dasar filsafat suatu Indonesia yang merdeka.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebab Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara Indonesia memunculkan 3 (tiga) implikasi yakni implikasi etis, implikasi yuridis dan implikasi politis. Implikasi etis adalah menjadikan nilai nilai Pancasila sebagai sumber norma etik bernegara. Implikasi yuridis adalah menjadikan nilai nilai Pancasila sebagai sumber hukum negara dan implikasi politis adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam arti nilainya menjadi cita cita dan pemersatu bangsa.

B. Kompetensi, Isi dan Area Pendidikan Kewarganegaraan

Hadirin yang kami muliakan,

Lalu apa hubungan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan ? Jika Pancasila sebagai nilai luhur bersama dan jatidiri bangsa hendak diwariskan_ Pancasila adalah warisan jenius pendiri bangsa (Yudi Latief, 2011)_ secara terus

berkesinambungan kepada generasi muda, maka pendidikan merupakan jalannya. Pancasila dibelajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan.

Will Kymlicka (2001) menyatakan "*Citizenship education is not just a matter of learning the basic facts about the institutions and procedures of political life; it also involves acquiring a range of dispositions, virtues and loyalties that are immediately bound up with the practice of democratic citizenship*". Pendidikan kewarganegaraan bukan melulu mengajarkan tentang fakta-fakta dasar tentang berbagai prinsip konstitusional, tetapi ia adalah persoalan menanamkan berbagai kebiasaan, kebaikan, serta jatidiri tertentu.

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan jatidiri bangsa. Perihal pendidikan akan karakter merupakan hal yang penting, sebab pendidikan nasional sasarannya adalah lahirnya manusia Indonesia yang berkarakter yaitu cerdas, religius, patriotik, humanis, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Pendidikan nasional kita pada dasarnya adalah pendidikan kewarganegaraan (Soedijarto, 2008). Pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan proses pembangunan berkehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan secara sistematis adalah dalam rangka perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Winataputra, 2008). Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Pancasila memiliki hubungan erat dengan sistem pendidikan nasional Indonesia, karena pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Pancasila menjadi *guidance principle* dalam proses pendidikan nasional (HAR Tilaar, 2009).

1. Pengertian dan Kompetensi pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positif influence* dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses untuk melatih siswa berfikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Somantri, 1976, 2001).

Definisi lain menyatakan Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD NRI 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 2000). Winataputra (2005) membuat definisi akademik pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren,

diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan.

Tujuan atau kompetensi umum yang hendak dicapai dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bahkan di negara lain umumnya adalah untuk membentuk warga negara agar menjadi warga negara yang baik (Azis Wahab & Sapriya, 2007 ; Kalidjernih, 2009). Berdasar ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 12 Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimaksudkan sebagai pendidikan untuk mengembangkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kesadaran bela negara para warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dapat dikatakan menjalankan misi sebagai pendidikan kebangsaan.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam pelajaran PKn tahun 2006 adalah membentuk warga negara yang baik yakni yang kritis, rasional, kreatif, aktif, bertanggung jawab, cerdas, anti korupsi, demokratis, sikap positif, dan interaktif. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam pelajaran PPKn 2013 adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia Sedangkan pada perkembangan terakhir, tujuan pendidikan kewarganegaraan di mata pelajaran Pendidikan Pancasila kurikulum Merdeka adalah membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Mengenai misi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, menunjukkan adanya keragaman misi atau tujuan yang akan dicapai. Menurut Budimansyah (2010), PKn merupakan bagian inheren dari pendidikan nasional untuk mencerdaskan bangsa Indonesia melalui koridor “ *value-based education*”. *Citizenship/civic education* telah berkembang menjadi suatu kajian dan program pendidikan demokrasi (Winataputra, 2001); merupakan salah satu bentuk pula dari pendidikan politik (Wahab, 1996); mengemban fungsi sebagai pendidikan politik, hukum dan nilai (Somantri, 2001); sebagai pendidikan nilai, demokrasi, moral dan pendidikan Pancasila (Suwarma, 2006), sebagai pendidikan politik hukum kenegaraan berbangsa dan bernegara NKRI, pendidikan nilai moral Pancasila dan Konstitusi NKRI, pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) NKRI dan sebagai pendidikan kewargaan negara (*civic education*) NKRI (Djahiri, 2007); sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan karakter bangsa, pendidikan nilai dan moral, pendidikan bela negara, pendidikan politik, dan pendidikan hukum (Sapriya, 2007); sebagai pendidikan nilai moral, pendidikan politik, pendidikan studi lanjutan dan pendidikan bela negara (Toyibin & Djahiri, 1997) dan sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan dan bela negara, pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan ketahanan bangsa (Dephan, 2006).

2. Isi dan Area Pendidikan Kewarganegaraan

Jika bidang studi pada umumnya menggunakan istilah *kognitif, afektif dan psikomotor*, maka pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah bidang studi telah memiliki nomenklatur tersendiri. Ini artinya pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian atau bidang studi telah memenuhi syarat ideal, terbukti dengan telah memiliki taksonomi sendiri.

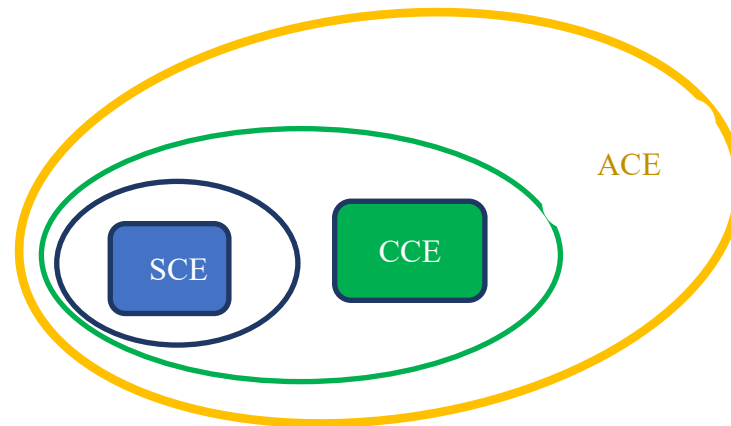
Menurut Margaret Stimman Branson (1998) terdapat 3 (tiga) komponen utama yang perlu dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan. Dikatakan sebagai berikut,

*“What are essential components of a good civic education? There are three essential components: **civic knowledge, civic skills, and civic dispositions**. The first essential component of civic education is civic knowledge that concerned with the content or what citizens ought to know; the subject matter, if you will. The second essential component of civic education in a democratic society is civic skills : intellectual and participatory skills. The third essential component of civic education, civic dispositions, refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitutional democracy”.*

Ketiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan itu adalah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*). *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warganegara ketahui. *Civic skill* merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warganegara yang mencakup; keterampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. Sedangkan *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik warganegara yang perlu dipelihara di negara demokrasi konstitusional.

Tiga komponen pendidikan kewarganegaraan ini pada prakteknya telah dilakukan di Indonesia. Misal di kurikulum 2013, dinyatakan bahwa tujuan umum mata pelajaran PPKn adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni 1) Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*)., 2) Pengetahuan kewarganegaraan., dan 3) Keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara paradigmatis pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 (tiga) wilayah atau domain, yakni domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001; Sapriya, 2012). Ketiga domain atau wilayah ini apabila diskemakan sebagai berikut:



Gambar 1. *Area of Civic Education*
(Sumber: Winataputra & Budimansyah, 2012)

Berkaitan dengan wilayah atau domain pendidikan kewarganegaraan di atas, menurut hemat penulis, lebih tepat menggunakan istilah *Area of Civic Education*. Area merujuk pada wilayah atau tempat berlangsungnya praksis pendidikan kewarganegaraan. Berdasar uraian di atas, Area of Civic Education mencakup 3 (tiga), yakni: School Civic Education (SCE), Community Civic Education (CCE) dan Academic Civic Education (ACE).

C. Integrasi Pancasila pada Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pancasila sebagai isi pendidikan kewarganegaraan

Keterkaitan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan Indonesia tidak hanya sebagai dasar dan tujuan tetapi juga Pancasila menempatkan diri sebagai isi dari pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang studi.

Isi dapat diartikan sebagai materi atau bahan ajar (*instructional materials*) dari pada pendidikan kewarganegaraan. Sapriya (2012) dengan mendasarkan pada pendapat Hanna dan Lee (1962) mengemukakan bahwa *content* untuk *Social Studies* dapat meliputi 3 (tiga) sumber, yaitu pertama, *informal content* yang dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat, kegiatan anggota DPR, kegiatan pejabat, dan lain-lain. Kedua, *the formal content disciplines* yang meliputi geografi, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, antropologi, dan yurisprudensi. Ketiga, *the response of pupils* yaitu tanggapan siswa baik yang bersifat *informal content* maupun *formal content*. Bahan ini dapat dikembangkan pada isi atau *content* PKn dengan catatan perlu disesuaikan dengan visi, misi, dan karakteristik PKn.

Jika dikaitkan dengan *formal content discipline* maka bahan PKn dapat diambilkan dari ilmu politik yakni *civic* atau ilmu kewarganegaraan. Secara keilmuan, apabila bertolak dari ilmu kewarganegaraan (*civic*) yang merupakan cabang dari ilmu politik, maka bahan ajar untuk PKn menfokuskan pada demokrasi politiknya yang selanjutnya masih perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa atau disebut *basic human activities* (Somantri, 2001)

Pancasila dalam hal ini termasuk konten (isi) PKn yang sifatnya *formal structure*. Isi yang bersifat *formal structure* harus sama dan tidak bisa ditawar-tawar (*unnegotiated, given*) karena merupakan unsur perekat dan pemersatu bangsa yang akan memperkuat semangat kebangsaan Indonesia. Numan Somantri (2001) menyebut Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai bahan PKn Indonesia yang bersifat “*The Great Ought*”, termasuk *Unavoidable Indotration*, yang perlu diinternalisasikan kepada warga negara. Dapat disimpulkan Pancasila menjadi bagian dari isi atau konten PKn.

Pengalaman penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menunjukkan Pancasila merupakan salah satu isi pelajaran pendidikan kewarganegaraanm bahkan dapat dikatakan Pancasila selalu menjadi isi dari pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan terakhir di kurikulum Merdeka, pelajaran Pendidikan Pancasila memiliki elemen yakni: Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Elemen yang dimaksud dapat dimaknai sebagi ruang lingkup materi. Setiap elemen memiliki deskripsi yang menggambarkan kompetensi dan materi.

2. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah

Pendidikan kewarganegaraan telah diterima dan diakui dalam sistem pendidikan nasional bahkan sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pendidikan kewarganegaraan pada rumusan di atas hendaknya dipandang sebagai istilah umum/generik atau pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*)_ meminjam istilah JJ Cogan dan David Kerr. Lalu bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan ini diimplementasikan dalam dimensi kurikuler atau *school civic education* (SCE)?

Pada jenjang sekolah atau pendidikan tinggi, pada umumnya pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berjalan sebagai pedoman atau rencana pendidikan. Pada tahun 2006, berdasar Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, disingkat Mapel PKn. Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan dimuatkan kedalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau ada pula yang menggunakan mana Mata Kuliah Kewarganegaraan berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi maupun Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta regulasi pelaksanaannya, yakni Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ristekdikti, No 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata

Kuliah Wajib Umum, kemudian diperbaharui lagi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Namun apabila kita mengikuti dinamika pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, sesungguhnya Indonesia telah melaksanakan visi dan misi pendidikan kewarganegaraan sejak lama yakni sejak tahun 1957. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler telah mengalami perkembangan termasuk perubahan nama diri. Perkembangan nama diri pendidikan kewarganegaraan di Indonesia khususnya di tingkat sekolah (*school civic education*) dapat dikemukakan sebagai berikut ;

- a. Mata pelajaran Kewarganegaraan tahun 1957
- b. Civic tahun 1959 dengan buku “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” sebagai buku sumber
- c. Kewargaan Negara tahun 1962
- d. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) tahun 1968
- e. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tahun 1975 dan 1984 dengan butir butir P4 sebagai sumber belajar
- f. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994 dan 1999
- g. Kewarganegaraan (Citizenship) tahun 2004 (uji coba kurikulum berbasis kompetensi)
- h. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tahun 2006 (berdasar Kurikulum 2006)
- i. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (berdasar Kurikulum 2013)
- j. Pendidikan Pancasila (berdasar Kurikulum Merdeka 2022)

3. Pengorganisasian isi Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam kategori pendidikan disiplin ilmu, lebih tepatnya lagi cabang dari pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan disiplin ilmu sebagai “suatu batang tubuh disiplin (baru) yang menyeleksi konsep, generalisasi, dan teori dari struktur disiplin-disiplin ilmu (universitas) dan disiplin ilmu pendidikan yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001). Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebiasaan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren, diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan (Budimansyah & Winataputra, 2012). Lalu bagaimana Pancasila sebagai isi dari pendidikan kewarganegaraan itu diorganisasikan untuk kepentingan pendidikan, lebih khusus untuk keperluan pembelajaran ?

Berdasar pada temuan penelitian yang telah saya lakukan, isi Pancasila pada PKn sebagai mata pelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, materi yang berisikan status, kedudukan, peran, atau fungsi Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berikutnya. Dua, materi yang berisikan isi yang terkandung dari konsep Pancasila itu sendiri. Isi Pancasila dalam PKn berisikan dua yakni perihal rumus atau eksistensi dan perihal isi atau substansi Pancasila.

Kategori status dan pengertiannya tersebut, sebagai berikut;

Tabel 1. Kategori status Pancasila dalam pelajaran PKn

No	Nomenklatur PKn	Status dan Fungsi Pancasila
1	Pendidikan Kewargaan Negara (1962)	Pancasila sebagai alat persatuan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Pancasila dan ilmu pengetahuan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai <i>way of life</i>
2	Pendidikan Moral Pancasila (1975/1984)	Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Pancasila sebagai kepribadian bangsa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, ketiganya ini masuk kepada fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Pancasila sebagai sumber tertib hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan kita, kelima status ini masuk pada fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara.
3	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994)	Pancasila terjabarkan kedalam nilai-nilai moral menurut masing-masing sila
4	Pendidikan Kewarganegaraan (2006)	Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila sebagai dasar negara
5	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2013)	Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup
6	Pendidikan Pancasila (2023)	Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila sebagai ideologi negara

Isi atau muatan dari Pancasila yang ada di pelajaran PPKn 1994 dan PKN 2006 menunjukkan perbedaan. Tafsir isi Pancasila dalam materi PPKn 1994 banyak merujuk pada butir-butir P4 ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yang umumnya berisikan tafsir filosofis yakni berisi norma-norma akan sikap dan perilaku hidup manusia yang sebaiknya dilakukan. Tafsir yang diberikan lebih menekankan pada pemikiran filosofis kaitannya dengan filsafat tentang manusia yang dilengkapi dengan pendekatan ideologis dengan maksud mengembangkan moral manusia Indonesia. Sementara itu, tafsir isi Pancasila dalam PKN 2006 memiliki keragaman tafsir. Ada tafsir sosiologis, ada tafsir filosofis, ada tafsir berdasar ideologi kebangsaan dan ada tafsir historis. Perlu penelitian lanjutan bagaimana isi Pancasila diberi tafsiran sebagai muatan dari pelajaran PPKn 2013 maupun Pendidikan Pancasila 2022 (Kurikulum Merdeka).

Tafsir perihal isi Pancasila berdasar perspektif pendiri negara, menurut hemat penulis, layak untuk dijadikan muatan Pancasila dalam PKN. Hal ini dikarenakan tafsir demikian dapat ditelusuri melalui pendekatan historis dan memiliki pertanggungjawaban akademik yang kuat. Dikatakan Silalahi (2001) Pancasila tidak perlu ditafsirkan panjang lebar, tetapi cukuplah apabila Pancasila itu ditafsirkan seperti apa yang diutarakan penggantinya. AB Kusuma (2006) juga menyatakan Pancasila harus dipahami dengan memperhatikan interpretasi dari para pembuatnya. Berdasar hal ini, tafsir Pancasila secara historis bisa dimuat sebagai materi PKN sebab secara akademik dapat dipertanggungjawabkan dan secara politis bisa diterima banyak kalangan.

Pengorganisasian materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasional beserta interpretasi atau tafsirnya perlu tetap diletakkan dalam konteks Pancasila dasar negara sebagai bentuk pemikiran akademik maupun politik. Dari segi pemikiran akademik, ia dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan pendekatan filosofis dan sejarah, dibantu dengan disiplin ilmu hukum dan sosiologi antropologi. Dari sisi pemikiran politik, pemikiran ini bisa diterima oleh segenap elemen bangsa karena dasarnya tetap berpijak pada konsensus nasional atau kesepakatan bersama Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan ini tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang didalamnya memuat Pancasila. Kesepakatan bangsa ini semakin kokoh dengan bukti bahwa MPR tidak akan melakukan perubahan terhadapnya. Dengan cara ini dimungkinkan dapat meminimalisir keragaman tafsir dan interpretasi atas Pancasila dan dengan demikian mampu menjadi materi PKN yang tetap dan bersifat mempersatukan bangsa.

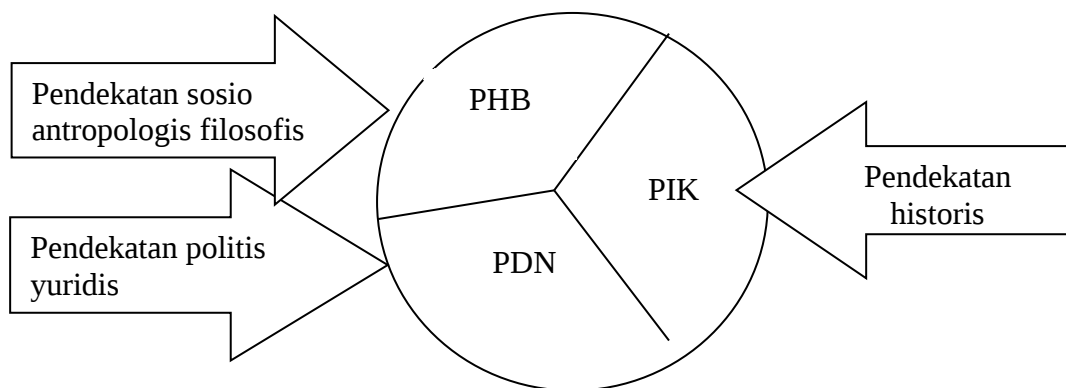
Perihal rumus atau eksistensi Pancasila sebagai materi dalam PKN, penulis menyatakan bahwa rumus atau eksistensi Pancasila berada dalam satu garis kontinum yakni bermula dari Pancasila pandangan hidup bangsa, berkembang menjadi Pancasila ideologi kebangsaan lalu diangkat Pancasila dasar negara. Ketiga eksistensi Pancasila itu diakui dan berkembang sebagai pemikiran akademik di Indonesia. Ketiganya juga merangkum atau mencakup rumus-rumus daripada

Pancasila yang lainnya. Pancasila pandangan hidup bangsa mencakup materi Pancasila falsafah hidup bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa dan jatidiri bangsa. Pancasila ideologi kebangsaan berisi materi sejarah perumusan Pancasila. Pancasila dasar negara mencakup materi Pancasila sebagai sumber hukum, Pancasila sebagai konsensus politik (perjanjian luhur), Pancasila sebagai ideologi nasional (menjadi cita-cita dan tujuan negara) dan Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa (ligatur bangsa).

Materi Pancasila perihal materi rumus, eksistensi, atau statusnya dapat dikembangkan dengan mempergunakan pendekatan ilmu sosiologis antropologis dan filosofis untuk mengkaji status Pancasila pandangan hidup bangsa, pendekatan historis (ilmu sejarah) untuk mengkaji status Pancasila ideologi kebangsaan dan pendekatan politis yuridis (ilmu politik dan hukum) untuk mengkaji status Pancasila dasar negara.

Sejalan dengan penataan ini, materi mengenai isi Pancasila juga bisa diuraikan menurut tafsir yang sejalan dengan pendekatan yang digunakan. Isi yang terkandung dalam Pancasila dalam statusnya sebagai pandangan hidup bangsa dapat dijelaskan menurut tafsir sosiologis antropologis dan filosofis. Isi Pancasila dalam statusnya sebagai ideologi kebangsaan dapat dijelaskan menurut tafsir historis perspektif pendiri negara. Sedangkan isi Pancasila dalam statusnya sebagai dasar negara dapat dijelaskan menurut tafsir yuridis.

Materi Pancasila dalam PKn dengan ketiga pendekatan tersebut dalam digambarkan dalam skema, sebagai berikut;



Gambar 2. Skema Kategori materi status Pancasila dan Pendekatannya

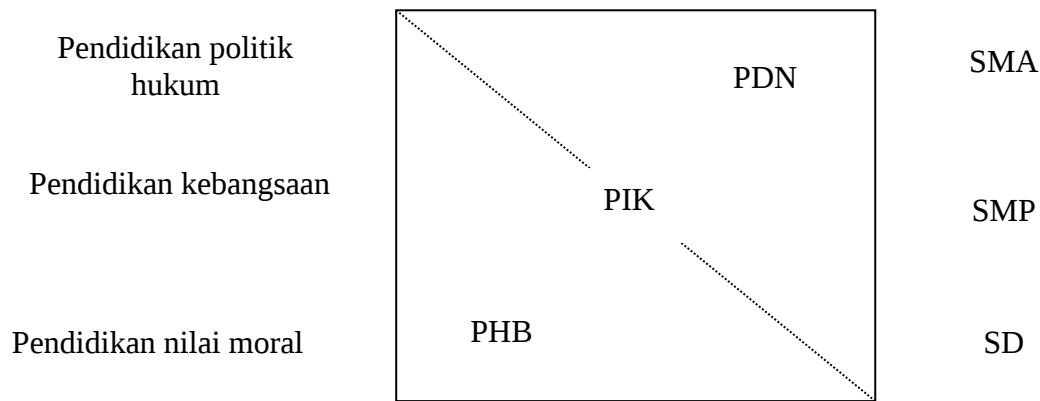
Keterangan:

- PHB : Pancasila Pandangan Hidup Bangsa
- PIK : Pancasila Ideologi Kebangsaan
- PDN : Pancasila Dasar Negara

Bagaimana menempatkan materi status Pancasila pada PKn menurut jenjang sekolahnya, menuntut penataan yang memungkinkan materi Pancasila ini tidak terjadi pengulangan atau reduplikasi materi dan sesuai dengan tingkat kognitif serta

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

perkembangan peserta didik. Berdasar kajian literatur dan pendapat informan, temuan penelitian menunjukkan perlunya penataan materi Pancasila disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada digambarkan di skema berikut;



Gambar 3. Skema Penataan materi Pancasila menurut jenjang pendidikan sekolah

Keterangan:

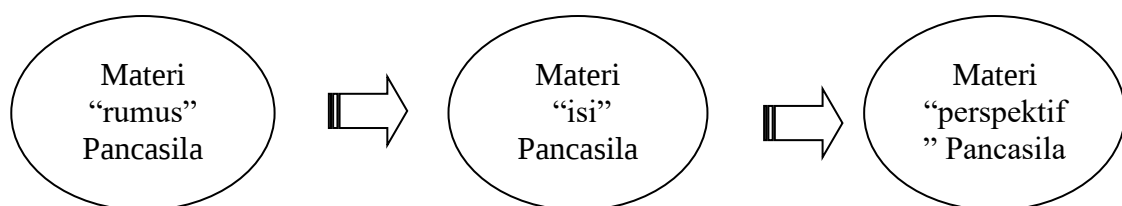
PHB : Pancasila Pandangan Hidup Bangsa

PIK : Pancasila Ideologi Kebangsaan

PDN : Pancasila Dasar Negara

Dengan penataan materi Pancasila sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, maka fungsi Pendidikan Kewarganegaraan bisa berbeda-beda tiap jenjangnya. Pada tingkat SD, PKn lebih berfungsi sebagai pendidikan nilai moral yakni mengembangkan nilai moral Pancasila pada peserta didik melalui materi Pancasila pandangan hidup bangsa. Pancasila pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilainya merupakan nilai –nilai luhur bangsa yang telah mengalami kristalisasi dan institusionalisasi dan diyakini sebagai nilai kebaikan yang memberi orientasi bagi hidup manusia Indonesia. Pada jenjang SMP, PKn lebih banyak berfungsi sebagai pendidikan kebangsaan yang berarti menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui materi sejarah perumusan Pancasila dan pengertian Pancasila menurut perspektif pendiri negara, sedang pada tingkat SMA PKn berfungsi sebagai pendidikan politik dan hukum melalui materi Pancasila dasar negara.

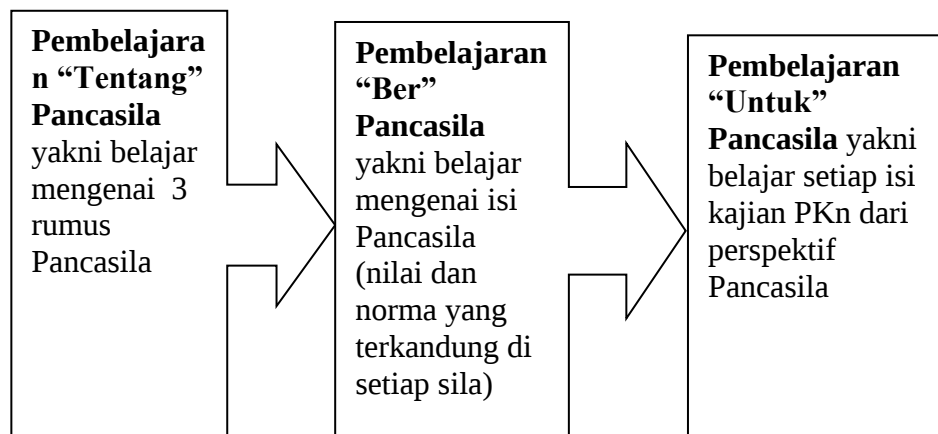
Selanjutnya dapat penulis sajikan perkembangan materi atau konten Pancasila dalam PKn pada skema sebagai berikut;



Gambar 4. Skema Perkembangan materi Pancasila dalam PKn

Dengan gambaran ini, penulis berpendapat bahwa pembelajaran Pancasila dalam PKn dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni 1) Pembelajaran tentang Pancasila, bermakna membelajarkan konten perihal “rumus” Pancasila yakni status, kedudukan, fungsi, arti pentingnya dalam kehidupan bernegara berikut penjabarannya yang diharapkan bermuara pada pemahaman Pancasila, 2) Pembelajaran ber-Pancasila, bermakna membelajarkan nilai dan norma sebagai “isi” daripada Pancasila yang diharapkan terwujud dan sikap dan perilaku warga negara yang berdasar Pancasila dan 3) Pembelajaran untuk Pancasila, bermakna membelajarkan kajian-kajian dalam PKn menurut “perspektif” Pancasila, yang diharapkan Pancasila menjadi sudut pandang bagi warga negara terhadap setiap lingkup permasalahan di Indonesia lebih khusus lagi dalam lingkup materi PKn. Pembelajaran untuk Pancasila ini masih merupakan suatu idealitas.

Ketiga tahap pembelajaran Pancasila ini dapat diskemakan sebagai berikut;



Gambar 5. Skema Tiga Tahapan Pembelajaran Pancasila dalam PKn

Selanjutnya hubungan antara materi Pancasila dan fungsi PKn dapat dideskripsikan sebagai berikut;

Tabel 2. Hubungan antara Materi Pancasila dan Fungsi PKn

Pancasila sebagai Isi PKn	Fungsi PKn
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa	Sebagai pendidikan nilai moral
Pancasila sebagai ideologi kebangsaan	Sebagai pendidikan kebangsaan
Pancasila sebagai dasar negara	Sebagai pendidikan politik dan hukum

Materi Pancasila dalam PKn termasuk bahan yang bersifat “The Great Ough” yang tidak dapat dihindari untuk disampaikan kepada peserta didik (*unavoidable indoctrination*) dalam rangka pembentukan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan pembangunan karakter keindonesiaan (*nation character building*). Materi Pancasila mengandung unsur filsafat pendidikan perrenialisme oleh karena ia merupakan nilai-nilai luhur sebagai warisan bangsa. Materi Pancasila dalam ilmu sosial termasuk bahan yang sifatnya *formal structure content* sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu isi bahan yang tersaji seharusnya sama dan tetap.

Materi Pancasila meliputi “rumus” Pancasila yakni Pancasila pandangan hidup bangsa, Pancasila ideologi kebangsaan, dan Pancasila dasar negara. Sebagai materi yang bersifat *formal structure content*, materi Pancasila tidaklah netral secara akademik. Ia terkait dengan kepentingan sebuah bangsa yakni kepentingan untuk melestarikan dan mewariskannya kepada tiap-tiap generasi. Pancasila telah diterima sebagai nilai kebajikan bersama, yang dalam gagasan kewarganegaraan komunitarian, dianggap sebagai konsepsi tentang kehidupan yang baik. Bangsa dalam hal ini penyelenggara negara berhak menyampaikan nilai-nilai kebajikan itu kepada warganya guna menjaga eksistensi dan keberlangsungan masyarakat itu sendiri.

D. Indeks Karakter Warga negara

1. Karakter warga negara Indonesia

Karakter dipahami sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. (Kemdiknas, 2010). William Kymlika dalam (Felix Baghi, 2009) menyatakan bahwa sumber suatu karakter atau jatidiri bangsa dimanapun umumnya ada tiga yakni asal usul etnis, iman religus dan gagasan mengenai kebaikan bersama. Asal usul etnis dalam hal ini budaya, iman religius dalam hal ini agama dan kebaikan bersama dalam hal ini adalah Pancasila.

Antara ketiga sumber karakter: agama, budaya dan gagasan sosial politik Pancasila, bisa dirasakan bahwa nilai ajaran agamalah yang paling kuat menghunjam atau mempatri dalam diri seseorang, oleh karena ajaran agama tidak hanya menjangkau masa kini tetapi mampu memberikan keyakinan akan hari di kemudian. Nilai-nilai Pancasila menjadi yang paling lemah keberlangsungannya kecuali melalui proses intervensi dengan perangkat hukum dan kebijakan politis lainnya. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan kristalisasi dari nilai –nilai agama dan nilai budaya bangsa. Bangsa Indonesia sudah ber”Pancasila” sebelum Indonesia merdeka yakni Pancasila dalam adat kebudayaan dan Pancasila dalam religius, setelah itu Pancasila dalam negara atau dikenal dengan istilah Pancasila dalam tri-prakara (Notonagoro, 1980). Nilai-nilai Pancasila sekarang ini adalah nilai-nilai Pancasila sebagai gagasan sosial politik bangsa Indonesia dalam bernegara. Dibandingkan dengan dua nilai sebelumnya, nilai Pancasila lebih bersifat konsensus nilai, nilai etik

bersama dan menjadi _dalam istilah Myron Weiner (1971)_integrasi nilai. Namun nilai Pancasila tidak sekuat nilai agama dan budaya dalam menyakinkan individu akan kebaikan dan kebenarannya. Nilai Pancasila lebih merupakan sebuah identitas yang dikonstruksi guna membangun keberlangsungan bangsa.

Karakter dibangun dari kebajikan (*virtue*) yang pada dasarnya berupa seperangkat nilai-nilai yang diyakini. Karakter manusia Indonesia dibangun dari kebajikan-kebajikan yang berupa nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku di masyarakat Indonesia. Sebagaimana disebutkan di atas nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai ajaran agama, budaya dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah pendidikan untuk membentuk seperangkat karakteristik sebagai warga negara yang sejalan dengan dan demi pandangan hidup komunitas politik yang bersangkutan bukan sekedar mempelajari fakta-fakta tentang pranata dan prosedur kehidupan politik, tetapi juga mencakup pembelajaran serangkaian disposisi, kebajikan, dan loyalitas (Kymlicka, 2001; Cogan, 1998; Galston, 1989). Ada hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dengan karakter. Bahwa alasan dasar bagi pemantapan dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah dalam rangka membentuk karakter baik karakter privat maupun karakter publik siswa sebagai bentuk pengamalan yang amat berharga untuk sukses di kehidupan publik selanjutnya (Branson, 1998).

Berdasar Kurikulum 2013, karakter warga negara Indonesia yang hendak dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan mencakup sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual merupakan perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal peserta didik dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan dari interaksi horisontal peserta didik dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan bersama. Karakter spiritual adalah beriman dan bertakwa yang ditandai dengan perilaku menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan karakter sosial adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerja sama, toleran, damai, santun, percaya diri, responsif, dan pro-aktif. Kedua karakter tersebut ditujukan terhadap obyek kajian bidang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang meliputi 4 (empat) konsep yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Dikaitkan dengan aspek kompetensi pendidikan kewarganegaraan, karakter berkaitan erat dengan *civic virtue* dalam diri seorang warga negara. Di Indonesia, *civic virtue* itu hendaknya selaras dan sejalan dengan nilai-nilai yang termuat di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bagaimana *civic virtue* warga negara Indonesia itu sendiri terhadap Pancasila? *Civic virtue* meliputi *civic commitment*, dan *civic disposition*. Dengan demikian secara sederhana indikator warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila diskemakan sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Warga Negara yang berkarakter Pancasila

Karakter Pancasila	Indikator
Komitmen terhadap Pancasila	Menerima Pancasila Meyakini kebenaran Pancasila Loyal pada Pancasila Bersedia mempertahankan Pancasila Bersedia melestarikan Pancasila
Sikap yang Pancasila	Sikap yang Religius Sikap yang Manusiawi Sikap yang Nasionalis Sikap yang Demokratis Sikap yang Adil

2. Penilaian karakter warga negara

Teknik penilaian yang dekat dengan karakteristik pendidikan kewarganegaraan yang bercirikan “value based education” dan juga berfungsi sebagai “character education” adalah teknik penilaian afektif atau sikap. Penilaian afektif merupakan penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai peserta didik. Penilaian afektif mencakup ranah afektif seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Teknik penilaian sikap dirasakan tepat oleh karena sejalan dengan ide pokok PKN yang ingin membentuk karakter warga ideal.

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain: angket, inventori, observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Contoh di atas guru menggunakan teknik angket dengan skala model Likert dengan lima skala yaitu : sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Selain skala model Likert, dapat pula digunakan skala model Thurstone dan skala Beda Semantik.

Dalam teknik pertanyaan langsung, kita dapat menanyakan secara langsung atau wawancara tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan sekolah mengenai "kebiasaan berdoa sebelum pelajaran". Perihal penggunaan teknik laporan pribadi, peserta didik diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya tentang "Kerusuhan Antar Suporter Sepakbola" Dari ulasan yang dibuat oleh peserta didik tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya.

Untuk menilai warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila, maka terlebih dahulu disusun butir butir item pernyataan berdasar indikator, yang telah disebutkan sebelumnya. Misal indikator Sikap terhadap Pancasila. Dari indikator ini bisa dijabarkan lagi kedalam sub indikator lalu baru dikembangkan butir butir

penyataan sesuai instrumen dari teknik penilaian sikap yang akan dilakukan. Instrumen yang umum digunakan misal dengan skala Likert dengan empat pilihan jawaban yakni : sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jika menggunakan lima option bisa menggunakan pilihan : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Sebagai contoh, indikator sikap Pancasila yakni sikap yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dapat dikembangkan dari berbagai rujukan, referensi akademik atau pemikiran di jalur yuridis, seperti di isi Ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Di dalam ketetapan tersebut disebutkan adanya beberapa indikator dari sikap baik religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan adil. Contoh, berdasar indikator sikap bersatu, kita dapat menyusun butir pernyataan sikapnya, yakni 1) mendukung kerukunan bangsa; 2) memiliki kepedulian, dan tanggung jawab sosial; 3) menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan; 4) semangat anti kekerasan; 5) bersedia dialog dalam memecahkan masalah; dan 6) menghormati kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya dengan cara demikian, kita dapat mengembangkan penilaian sikap guna mengetahui karakter warga negara yang berdasar Pancasila.

E. Simpulan

Pancasila sebagai nilai kebajikan bangsa Indonesia, salah satu sumber karakter_dlm perspektif filsafat pendidikan perrenialisme_ layak untuk disampaikan kepada warga muda melalui pendidikan agar mereka nantinya bersedia menerima, melestarikan dan menjadikannya sebagai sumber pengembangan karakter. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan system dan struktur pemerintahan tetapi juga menanamkan disposisi, karakter dan Kebajikan bagi warga muda

Pancasila menjadi isi utama pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Materi Pancasila bisa diorganisasikan menjadi materi Pancasila pandangan hidup bangsa, Pancasila ideologi kebangsaan dan Pancasila dasar (filsafat) negara. Dengan pengorganisasian ini, PKn mampu menjalankan fungsinya sbg pendidikan nilai moral (SD), pendidikan kebangsaan (SMP) dan pendidikan politik hukum (SMA)

Karakter berdasar Pancasila adalah sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Yakni karakter yang religious, manusiawi, Bersatu, demokratis dan adil. Penilaian karakter melalui penilaian aspek afektif dengan terlebih dahulu menjabarkan 5 karakter utama tersebut menjadi indeks karakter.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin yang saya hormati,

Capaian saya ini adalah karena adanya kemudahan dan anugerah dari Allah swt. Kemudahan yang dikaruniakan Allah tersebut antara lain diwujudkan melalui dukungan, bantuan, kerja dan doa dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, Prof. Dr. Hartono, dr., M Si.
3. Ketua Wali Amanat, Prof. Muliaman Darmansyah Hadad, Ph.D.; Wakil ketua, Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd.; Sekretaris, Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. dan para Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret
4. Para Wakil Rektor: Prof. Dr. Fitria Rahmawati, M.S.; Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., C.FrA.; Prof. Ir. Dody Ariawan, S.T., M.T., Ph.D. dan Prof. Irwan Tri Nugroho, S.E., M. Sc., Ph.D.
5. Ketua Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Prof. Dr. Sri Sulistyowati, dr., Sp. OG(K), Sekretaris Senat Akademik Prof. Dr. Moh Jamin, SH, MH., dan segenap anggota Senat Akademik Universitas Sebelas Maret.
6. Ketua Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret Prof. Drs. Suranto Tjiptowibisono, M.Sc., Ph.D.; Sekretaris Dewan Profesor Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si. dan segenap anggota Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret.
7. Ketua Tim PAK Universitas Sebelas Maret Prof. Drs. Suranto Tjiptowibisono,, M.Sc., Ph.D., beserta segenap anggota Tim PAK
8. Dekan FKIP, Dr. Iman Sujadi, M.Si dan para Wakil Dekan Dr. paed. Nurma Yunita, SPd, MPd, MSi,; Dr Yuyun Estriyanto, ST, MT, dan Prof. Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si.,
9. Ketua Senat Akademik FKIP Prof. Dr. Munawir, M.Psi., Sekretaris Prof. Dr. Mulyanto, MPd beserta segenap anggota senat akademik.
10. Ketua beserta anggota Tim PAK FKIP Universitas Sebelas Maret, Dr. Dewi Kusuma Wardhani, M.Si, Prof. Dr. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D.; Prof. Dr. Mulyanto, M.Pd.; Prof. Dr. Dyah Sulistyaningrum, M.Pd.; Dr. Anayanti Rahmawati, M.A.
11. Tim Asistensi Kelayakan Pengukuhan Guru Besar UNS.
12. Pimpinan dan kolega dosen di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS.

13. Para guru saya di SD Negeri Wonoboyo 1, SMP Negeri 2 Wonogiri, dan SPG Negeri Wonogiri, juga para dosen saya di Prodi S1 PMP_KN UNS, Prodi S2 Ketahanan Nasional UGM, dan Prodi S3 Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
14. Pembimbing skripsi Dr. Drs. Hasan Suryono, SH, MPd (Alm); Pembimbing tesis, yaitu Dr. Syafiq Efendi, M Si, Promotor dan Kopromotor disertasi saya; Prof. Nu'man Somantri, MSc (Alm) dan Prof. Dr. Astim Riyanto, SH, MH.
15. Kolaborator dan Tim Research Group kegiatan penelitian dan pengabdian saya; Prof. Dr Kokom Komalasari, MPd (UPI) , Dr Junaedi Indrawadi, MPd (UNP); Pipit Widiatmaka, MSc (IAIN Pontianak) dan Dr. Norhafiza Mohd Hed (UPSI Malaysia)
16. Rekan-rekan di Pusat Studi Pancasila LPPMP yang diketuai Prof. Dr. Leo Agung S, M Pd., Prof. Dr. Triyanto, SH, M Hum, Dr Bramastia, M Pd, dan anggota peer grup lain yang telah mengasah dan memberi pengalaman dalam tridarma perguruan tinggi saya.
17. Pimpinan dan editor Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta yang telah menerbitkan buku buku sekolah karya saya sejak tahun 2004
18. Pimpinan dan editor Bumi Aksara Jakarta telah menerbitkan buku buku perguruan tinggi karya saya sejak tahun 2006
19. Rekan-rekan Kantin Rabu Malam sebagai tempat diskusi dan yang selalu memberikan siraman rohani dan mental
20. Tim SDM FKIP; Mas Sriyono, Mas Sidik, dan Mbak Rahma
21. Pimpinan, pengurus, dan anggota AP3KnI (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia); ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), AKD MKWK SI (Asosiasi Kelembagaan dan Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum Seluruh Indonesia)
22. Pengurus, dan anggota ikatan alumni; Ikatan alumni UNS (IKA UNS) , Keluarga Alumni FKIP (KAFKIP), Ikatan Alumni Pendidikan Kewarganegaraan (IKADIKGRA), Ikatan Mahasiswa S2 PPKn; alumni SEMA dan BEM FKIP UNS 1993, dan alumni PMP-KN 1990
23. Super tim yang membantu dalam kegiatan akademik, riset, dan proses kerja di prodi S2 PPKn UNS sampai pengukuhan ini : mbak Deka, Husnul F, Wina Salsabila, Lail Nur F, Ardhin , Bariq Maulana dan Arif Subowo.
24. Orang tua saya, almarhum Bapak Narmo dan Ibu Darmini yang telah mendidik, mengajari saya tentang kerasnya kehidupan, dan untuk tangguh berjuang di tengah hidup yang berkesulitan.
25. Bapak ibu mertua almarhum Bapak. Wakhid dan Ibu Ninuk Sutiyah yang senantiasa memberi perhatian dan mendoakan saya.
26. Saudara kandung dan ipar saya: Mbak Inten (almh), Kang Suwarno beserta istri; Mas Suyatno beserta istri, adik saya Pahdani beserta suami, Dwi Yuningsih, M Kes, Sigit Mohammad Sholeh, ST ; serta semua keponakan saya yang bisa

membuat jalinan silaturahmi untuk terus ada.

27. Saudara dan keluarga besar saya dari Wonogiri dan Solo
28. Istri saya, Santi Husdiah, AMF, S Kes. yang telah setia mendampingi untuk bersama mendidik anak-anak; pinter mengelola anggaran rumah tangga, selalu mendoakan dengan doa-doa yang mustajab, dan pastinya sabar untuk mendengar suara suara lantang suaminya ini.
29. Anak-anakku: Zahra Syifa P, Rashid Ahmad F dan Nadhifa Sanwa A yang selalu menciptakan hari-hari yang menyenangkan, terutama saat mengantar ke sekolah.
30. Segenap panitia pengukuhan guru besar UNS yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara hari ini.
31. Para wartawan baik dari media cetak maupun media elektronik yang selama ini mendukung dalam setiap kegiatan saya selama ini serta dalam peliputan acara pengukuhan hari ini.
32. Semua pihak yang telah berkenan membantu doa, waktu, tenaga serta materi yang tidak bisa saya sampaikan satu per satu.

Atas kelapangan dan kebaikan hati Bapak/Ibu/Saudara, saya mendoakan semoga Allah mengaruniakan pahala berlipat ganda serta kesehatan kepada Bapak/Ibu/Saudara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah dengan sabar mengikuti acara ini. Jika ada kekurangan pada pidato saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Wahab & Sapriya. 2007. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. SPS UPI. Bandung : UPI Press
- Adian Huzaini. 2010. *Pendidikan Islam dalam membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*. Jakarta : Universitas Ibnu Khaldun
- Bourchier, David . 2007. *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organis*. Yogyakarta : Aditya Media dan PSP UGM.
- Cogan, John J. & Derricott, Ray. (Eds). 1998. *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Context*. London: Kogan Page
- Eka Darmaputra .1997. *Pancasila antara Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya*. Edisi ke-6. Jakarta: Gunung Agung
- Felix Baghi. 2009. *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere : Penerbit Ledalero
- Freddy K Kalidjernih. 2007. *Cakrawala Baru Kewarganegaraan, Refleksi Sosiologis Indonesia* . Jakarta: Regina
- Freddy K Kalidjernih. 2010. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan* . Edisi Kedua. Bandung: Widya Aksara Press.
- Irfan Nasution & Rony Agustinus (Peny). 2006. *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* Proseding dalam Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila . Jakarta : FISIP UI
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila* . Yogyakarta : Paradigma
- Kemdiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta : Pusat Kurikulum, Kemdiknas
- Lorin W. Anderson & David R. Krathwohl. (ed). 2017. *Kerangka landasan untuk pembelajaran, pengajaran, dan asesment : Revisi taksonomi pendidikan Bloom*. Penerjemah: Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara .2005. *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam kehidupan Bernegara*. Jakarta: Cipta Prima Budaya.
- Margaret S Branson. 1998. "The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy" Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Tersedia di www.civiced.org.
- Mohammad Hatta. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pandji Masyarakat
- Notonagoro. 1980. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Cet ke-5. Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

- Nu'man Somantri dan Udin S Winataputra. 2017. *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan : Kultur Akademis dan Pedagogis*. Bandung: Laboratorium PKn UPI
- Nu'man Somantri. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung. Rosda Karya
- Pemerintah RI. 2010. *Rencana Induk Pendidikan Karakter Bangsa 2010-2025* Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Pranarka. 1985. *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta : CSIS
- Rusli Karim. 1998. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silalahi .2001. *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara*. Jakarta : Gramedia.
- Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : Penerbit Kompas.
- Tilaar, HAR. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Will Kymlicka. 2004. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*. Pent: Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno dan H. Nurgiansyah. 2021. *Civic (Ilmu Kewarganegaraan), Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ombak
- Winarno. 2023. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno. 2020. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno. 2024. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; Isi Stategi dan Penilaian . Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno. 2011. *Implementasi Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membangun jati diri bangsa*. Disertasi Pendidikan Kewarganegaraan, SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan
- Winataputra, Udin Saripudin. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. Disertasi Pendidikan IPS. Bandung : PPS UPI. Tidak diterbitkan.
- Winatapura, Udin S & Budimansyah, Dasim. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional*. Bandung: Widya Aksara Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Prof. Dr. Winarno, S.Pd., M.Si.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Wonogiri, 13 Agustus 1971
4.	Jabatan Fungsional/ Pangkat	Guru Besar / IVc
5.	Jabatan Struktural	Kepala Prodi Magister PPKn
6.	NIP / NIK / Identitas lainnya	197108131997021001
7.	NIDN	0013087106
8.	E-mail	winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id
9.	Nomor Telepon / HP	085640414449
10.	Alamat Kantor	Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta Jl. Ir. Sutami No. 36a Surakarta

B. IDENTITAS KELUARGA

1.	Istri	Santi Husdiyah, AMF
2.	Anak	1. Zahira Syifa Primadita 2. Rashif Ahmad Fahizal 3. Nadifa Sanwa Aisyafira

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Strata	Universitas	Program Studi	Tahun
S1	Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta	PMP-Kn	1990 -1995
S2	Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta	Ketahanan Nasional	1999 – 2002
S3	Universitas Pendidikan Indonesia(UPI) Bandung	Pendidikan Kewarganegaraan	2008 – 2011

D. PENGALAMAN MANAJEMEN INSTITUSI

No.	Jabatan	Tahun
1.	Anggota Tim Akreditasi Internasional Agency for Quality Assurance through Accreditation (AQAS) Program Studi S1 PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS)	2023-2024
2.	Penanggung Jawab tim penyusun borang akreditasi Program Studi S2 PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS)	2023-2024

E. PENGALAMAN ASESOR / REVIEWER / AUDITOR / PENUGASAN SEJENIS

No.	Jabatan	Tahun
1.	Editor modul : MODUL PELATIHAN MOTIVASI USAHA Program Pengembangan Model Ekonomi Mikro	2019
2.	Editor modul : MODUL MOTIVASI KELOMPOK Program Pengembangan Model Ekonomi Mikro	2019
3.	Reviewer naskah Jurnal Humanika	2020
4.	Reviewer Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan	2021
5.	Reviewer naskah "Experiences of Learners with Visual Impairment in the Mainstream Secondary School Classrooms in Malawi: A Case Study of Mzimba District" International Journal of Instruction	2023
6.	Reviewer naskah "Effects of Motivation on Creativity in Art and Design Education" International Journal of Instruction	2023
7.	Reviewer Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan	2023
8.	Asesor BAN PT	2019-2024
9.	Asesor Lamdik	2024-sekarang
10.	Asesor BKD FKIP UNS	2024-sekarang

F. RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Pangkat	Gol. Ruang	Nomor SK	TMT SK	Masa Kerja
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	00001/KEP/AA/15001/24	2024-02-01	27 Tahun 0 Bulan
2.	Pembina Tk.I	IV/b	105254/A2.3/KP/2017	2017-10-01	20 Tahun 8 Bulan
3.	Pembina	IV/a	110081/A4.3/KP/2013	2013-04-01	16 Tahun 2 Bulan
4.	Penata Tk.I	III/d	37380/A4.5/KP/2009	2009-04-01	12 Tahun 2 Bulan

5.	Penata	III/c	7567/J27/KP/2005	2005-10-01	8 Tahun 8 Bulan
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	7753/J27/KP/2002	2002-04-01	5 Tahun 2 Bulan
7.	Penata Muda	III/a	1200/J27/KP/1998	1998-03-01	1 Tahun 1 Bulan

G. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

No	Jabatan	Jabatan Detail	Nomor SK	TMT Awal	TMT Akhir
1.	Guru Besar	GURU BESAR MADYA/GB-850	94828/M/07/2024	2024-09-01	-
2.	Lektor Kepala	LEKTOR KEPALA MADYA/LK-550	80482/A4.5/KP/2008	2009-01-01	2024-09-01
3.	Lektor	LEKTOR MUDA/LEKTOR-200	3975/J27/KP/2005	2005-06-01	2009-01-01
4.	Asisten Ahli	ASISTEN AHLI/AA-150	2267/J27/KP/2001	2001-01-01	2005-06-01
3.	Asisten Ahli	ASISTEN AHLI MADYA/AA-100	5594/J27/KP/1998	1998-07-01	2001-01-01
6.	Tenaga Pengajar	TENAGA PENGAJAR	8493/A2/KP/1997	1997-02-01	1998-07-01

H. PENGALAMAN JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Jabatan Detail	Nomor SK	TMT Awal	TMT Akhir
1.	Kepala	Kepala Laboratorium PPKn		2003	2007
2.	Koordinator	Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU) Pendidikan Pancasila UPT UNS		2003	2007
3.	Kepala Program Studi S1	Kepala Program Studi S1 PPKn UNS	756/UN27/KP/2015	2015-06-18	2019-05-27
4.	Kepala Program Studi S1	Kepala Program Studi S1 PPKn UNS	524/UN27/KP/2019	2019-05-28	2023-05-28
5.	Sekretaris Komisi Fakultas	Sekretaris Komisi Senat Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia Fakultas KIP	52.30/UN27/HK/2021	2021-01-01	2023-11-19
6.	Kepala Program Studi S2	Kepala Program Studi S2 PPKn	1334/UN27/HK/2024	2024-09-24	2029-09-24

I. PENGALAMAN MENGAJAR

No.	Nama Mata Kuliah yang diasuh/ pernah diasuh	Strata
1.	Pengajaran Mikro	S1
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	S1
3.	Pendidikan Pancasila	S1
4.	Strategi Pembelajaran PKn	S1
5.	Penulisan Bahan Ajar	S1
6.	Pembangunan Politik	S1
7.	Penilaian Pembelajaran PKn	S1
8.	Filsafat Ilmu	S2
9.	Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer	S2
10.	Etika Politik dan Pemerintahan	S2

J. PUBLIKASI JURNAL NASIONAL / INTERNASIONAL

No.	Judul Tulisan	Tahun	Posisi Penulis	Nama Jurnal
1.	Strategi Penanaman Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Terkikisnya Nasionalisme Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi	2013	Penulis Pertama	Jurnal Ketahanan Nasional
2.	Views and Attitude of Religious Leaders towards the Ideology of Pancasila: The Perspectives of Five Religions in Indonesia	2016	Penulis Pertama	Journal of Social Science and Humanities
3.	Ideology nationalisme in Civic texbook in Indonesia	2017	Penulis Pertama	International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
4.	Cognitive Moral Approach to Civics Education Material Development in the Elementary School	2017	Penulis Ketiga	Jurnal Kependidikan, Penelitian Inovasi Pembelajaran
5.	Pengaruh penilaian diagnostik terhadap penguasaan kompetensi Mensistesikan Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NRI 1945	2017	Penulis Kedua	Jurnal Pkn Progresif
6.	Pendekatan Cognitive Moral Sebagai Kerangka Pengembangan Bahan Ajar Ppkn Di Sekolah Dasar	2017	Penulis Ketiga	Jurnal Kependidikan, Penelitian

No.	Judul Tulisan	Tahun	Posisi Penulis	Nama Jurnal
				Inovasi Pembelajaran
7.	The Ideology of nationalisme in Civic texbook in Indonesia	2017	Penulis Pertama	International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
8.	The Needs For Contextual In Teaching Materials On Writing Kid Stories Grade 4th Elementary School	2018	Penulis Ketiga	Journal of Education and Learning (EduLearn)
9.	Cognitive Moral Based on Civics Education Material in Elementary School	2018	Penulis Ketiga	Journal of Education and Learning (EduLearn)
10.	The Use of Contextual Learning-Based Civic Education Textbook to Increase Student Outcomes in Grade V Elementary School	2018	Penulis Ketiga	International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)
11.	The Need Textbook Writing of Children's Story Based on Character Education	2018	Penulis Kedua	International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS),
12.	Materi Pembelajaran PPKn Berbasis Nilai Lokal: Identifikasi dan Implementasi	2018	Penulis Pertama	JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan
13.	Implementasi Teknik Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Untuk Menghadapi Era Digital	2018	Penulis Ketiga	Jurnal Manajemen & Supervisi Pendidikan
14.	Reinforcing Civics Literacy in Sustaining Students	2019	Penulis Kedua	Universal Journal of Educational Research
15.	Implementasi penguatan pendidikan karakter untuk mengembangkan	2019	Penulis Kedua	JPK: Jurnal Pancasila dan

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

No.	Judul Tulisan	Tahun	Posisi Penulis	Nama Jurnal
	kecerdasan moral di Sekolah Menengah Atas			Kewarganegaraan
16.	Dari terminologi ke substansi pendidikan kewarganegaraan: Implikasi terhadap revitalisasi Pancasila	2019	Penulis Kedua	Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan
17.	Reinforcing Civics Literacy in Sustaining Students' Learning in the Industrial Era 4.0	2019	Penulis Keempat	Universal Journal of Educational Research
18.	Strengthening Tolerance Attitude through Jaga Sesama Community	2019	Penulis Ketiga	Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)
19.	Citizen Character Are Reviewed From Context Citizenship Education in Indonesia	2020	Penulis Pertama	IOSR Journal Of Humanities And Social Science
20.	Innovation in Assessment of Civic Education in School	2020	Penulis Pertama	International Journal of Psychosocial Rehabilitation
21.	Analisis Kesulitan Guru PPKn dalam Mengembangkan Materi Pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika	2020	Penulis Pertama	Journal of Moral and Civic Education
22.	Reinforcing Civic Dispositions through a Value Analysis Approach on Civics Education Subjects in Schools	2020	Penulis Kedua	International Journal of Innovation
23.	Gagasan Kewarganegaraan Indonesia dalam Perspektif Sejarah	2020	Penulis Pertama	Journal of Moral and Civic Education
24.	Development of Educational Comic with Local Wisdom to Foster Morality of Elementary School Students: A Need Analysis	2020	Penulis Ketiga	International Journal of Educational Methodology
25.	Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Materi Pembelajaran PPKn Kajian Bhinneka Tunggal Ika Berbantuan Website	2020	Penulis Pertama	Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Judul Tulisan	Tahun	Posisi Penulis	Nama Jurnal
26.	Citizen Character Are Reviewed From Context Citizenship Education in Indonesia	2020	Penulis Pertama	IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
27.	Upaya Membangun Karakter Bangsa Mencegah Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia	2020	Penulis Kedua	Jurnal PPKn
28.	Innovation in Assessment of Civic Education in School	2020	Penulis Pertama	International Journal of Psychosocial Rehabilitation
29.	Analysis of attributes of citizenship in legal dimension	2021	Penulis Pertama	Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan
30.	Strategi Guru PPKn Dalam Mengembangkan Instrumen Penilaian Kecakapan Kewarganegaraan	2021	Penulis Kedua	Jurnal PPKn
31.	Pemberdayaan Organisasi Kesiswaan Guna Mencegah Radikalisme Di Kalangan Siswa	2021	Penulis Ketiga	Jurnal PPKn : Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
32.	Hubungan Antara Minat Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran PPKn Selama Pembelajaran dalam Jaringan Kelas X MIPA SMA Negeri 2 Surakarta	2021	Penulis Kedua	Jurnal Profesi Pendidik, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
33.	Analisis kesulitan guru dalam mengembangkan materi UUD 1945 berbasis putusan Mahkamah Konstitusi	2021	Penulis Pertama	Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan
34.	Characterization of Indonesia citizenship in legal perspective	2021	Penulis Pertama	Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

No.	Judul Tulisan	Tahun	Posisi Penulis	Nama Jurnal
35.	The Implementation of Individualized distance learning program for ABK children in Inclusive Schools during the Covid-19 pandemic	2021	Penulis Ketiga	Jurnal Inovasi Pembelajaran, Universitas Muhammadiyah Malang
36.	Analisis Dampak Aktivitas Proyek Tambang Timah di Perairan Laut Pulau Bangka Terhadap Hak atas Pekerjaan Nelayan Tradisional : Perspektif Inclusive Citizenship	2021	Penulis Kedua	Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
37.	Konservasi Kearifan Lokal Tari Dolalak sebagai Civics Culture Kabupaten Purworejo	2022	Penulis Kedua	Jurnal Kewarganegaraan Department of Pancasila and Citizenship Education Faculty of Teacher and Training
38.	Pemberian Sanksi Berjenjang sebagai Upaya Membangun Civic Disposition Berupa Sikap Jujur dan Disiplin pada Santri (Studi di Pondok Pesantren Darussalam Kecamatan Tanon, Kab Sragen)	2022	Penulis Kedua	Jurnal PPKn : Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IAPCEL
39.	Audiovisual Learning Media Based on Local Wisdom Values of the Baduy Tribe Community to Grow Student Character	2023	Penulis Kedua	International Journal of Elementary Education
40.	Blended Learning: How Can Multimedia Enhance Students' Characters?	2023	Penulis Ketiga	New Educational Review
41.	Authentic assessment in online learning to develop students' character	2023	Penulis Pertama	Kasetsart Journal of Social Sciences
42.	Exploring citizenship competencies in Pancasila subjects through local wisdom in the Merdeka curriculum	2023	Penulis Kedua	Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan
43.	Infisdial as Learning Media for Strengthening	2023	Penulis Kedua	Journal of Education Technology

No.	Judul Tulisan	Tahun	Posisi Penulis	Nama Jurnal
44.	Effectiveness of Augmented Reality Based Learning Media to Improve Critical Thinking Skills on IPAS Material	2024	Penulis Kedua	Jurnal Penelitian Pendidikan IPA
45.	Readiness and efforts of civics teachers in developing literacy and numeracy skills	2024	Penulis Pertama	Journal of Education and Learning,

K. SIMPOSIUM / SEMINAR / PANITIA

No.	Nama	Kedudukan Peranan	Tahun	Tempat
1.	Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	<i>First-author</i>	2017	Seminar Nasional dan Muswil AP3KnI
2.	The Development Of The Textbook Writing Of The Children's Story Based Character Education In The Elementary School	<i>Co-author</i>	2017	The 5th International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI) 2017, ISSN 2443-1753
3.	Dinamika Global dan pengaruhnya terhadap negara bangsa	<i>Co-author</i>	2017	Seminar Nasional PKn Unnes, Penguatan Spirit kebangsaan di tengah Tarikan Primordialis me dan Globalisme
4.	Teacher's Strategy in Student Deradicalization Efforts through Enforcement of the Pancasila	<i>First-author</i>	2018	Proceedings of the Annual Civic Education

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

No.	Nama	Kedudukan Peranan	Tahun	Tempat
	Ideology within Civic Education Materials in Indonesia			Conference (ACEC 2018)
5.	Teacher's Strategy in Student Deradicalization Efforts through Enforcement of the Pancasila Ideology within Civic Education Materials in Indonesia	<i>Co-author</i>	2018	Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)
6.	Pembudayaan Nilai –Nilai Pancasila Melalui Analisis Materi PPKn di Sekolah	<i>Co-author</i>	2018	Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 “Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan”
7.	Using Critical Multiliteracy Learning in Developing Students' Civic Literacy in the Industrial Era 4.0 Education	<i>Co-author</i>	2019	The 2nd International Conference on Science, Mathematics, Environment, and Education, 2019, 020111 (2019)
8.	An Analysis of Character Values in Civic Education Textbook for Junior High School Student	<i>Co-author</i>	2019	Conference: Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Innovation and Quality

No.	Nama	Kedudukan Peranan	Tahun	Tempat
				Education (ICLIQE 2019)
9.	Using critical multiliteracy learning in developing students' civic literacy in the industrial era 4.0 education	<i>Co-author</i>	2019	AIP Conference Proceedings 2019
10.	The Implantation of Nationalism in Globalization Era Using Value Clarification Learning Models	<i>Co-author</i>	2019	1st International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE 2018)
11.	The Difficulty of Civic Education Teacher to Understanding the Characteristics of Students as part of Pedagogical Competence	<i>Co-author</i>	2019	Proceedings of the 3rd Asian Education Symposium (AES 2018)
12.	The Strategy of Improving Student Learning Interest Through the Use of Video as Learning Media in Civic Education Learning	<i>First-author</i>	2020	Proceedings of the International Conference on Progressive Education (ICOPE)
13.	The Role of Teachers' in Developing Students' Cooperative Attitudes	<i>Co-author</i>	2020	the 3rd International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2019), 2020, 397,
14.	The Roles of Jaga Sesama Social Community to Strengthen the Religion Character of Surakarta Society	<i>Co-author</i>	2020	the 3rd International Conference on Learning Innovation and Quality Education

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

No.	Nama	Kedudukan Peranan	Tahun	Tempat
				(ICLIQE 2019), 2020, 397,
15.	Developing Civic Responsibility in the Community Through the Social Community "Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo)"	<i>Co-author</i>	2020	3rd International Conference on Learning Innovation and Quality Education , 2019, 397
16.	The Roles of Jaga Sesama Social Community to Strengthen the Religion Character of Surakarta Society	<i>Co-author</i>	2020	Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2019)
17.	The Role of Teachers' in Developing Students' Cooperative Attitudes	<i>Co-author</i>	2020	Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2019)
18.	Kursus Pengajian Kenegaraan Di Ipta: Kesan Ke Atas Partisipasi Politik Mahasiswa Malaysia	<i>Co-author</i>	2021	The 1st International Conference on Social Studies and Citizenship (ICSSC)
19.	Management of Community Based on the Democratic Education in Qarryah Tayyibah Salatiga Learning Community	<i>Co-author</i>	2021	Proceedings of the 1st International Conference on Character Education (ICCE 2020)

No.	Nama	Kedudukan Peranan	Tahun	Tempat
20.	The Problems of Using Online-Based Individual Learning Programs During the Covid-19 Pandemic	<i>Co-author</i>	2022	International Conference on Social Sciences, education, and Humanities 2022
21.	Analysis of The Difficulties of Pancasila and Civic Education Teachers in Implementing an Independent Curriculum for Learning in the Digital Era	<i>Co-author</i>	2022	Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences and Education (ICSSE 2022)
22.	Tolerance of Local Wisdom "Nemui Nyimah" Multi Ethnic Community in Community Education Environment	<i>Co-author</i>	2022	Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences and Education (ICSSE 2022)
23.	The Integration of the values of local wisdom of the Baduy people in social studies learning to foster the disciplined character of elementary school students	<i>Co-author</i>	2022	Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences and Education (ICSSE 2022)
24.	Actualization of Pancasila Values in the Context of Interaction of Persons with Disabilities in Trenggalek Inclusive Housing	<i>Co-author</i>	2023	Proceedings of the 3 rd International Conference on Social Sciences and Education (ICSSE 2022)

L. KARYA BUKU

	Judul Buku	Tahun	ISBN	Penerbit
1.	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan SMA/ MA 2A	2014	978-602-257-138-4	Tiga Serangkai
2.	Buku Seri Pendidikan Politik Pancasila dan UUD NRI 1945	2014	978-602-171-0	Ombak
3.	Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa	2015	978-602-99130-6-4	LPPM UNS
4.	Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi	2015	978-602-73736-1-7	LPPM UNS
5.	Pendidikan Kewarganegaraan 3 untuk kelas XII SMA dan MA	2015	978-979-084-754-5	Global Tiga Serangkai
6.	Indonesia Baru, Empat Konsensus Satu Dasar Berbangsa dan Bernegara Indonesia	2015	978-602-258-300-4	Ombak
7.	Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	2016	978-602-6470-02-7	Belmawa Kemristek dikti
8.	Kewarganegaraan	2016	978-602-60654-5-2	LPPM UNS
9.	Pancasila Berbasis Riset	2016	978-602-60654-4-5	LPPM UNS
10.	Paradigma Baru Pendidikan Pancasila	2016	978-602-217-914-6	Bumi Aksara
11.	PENILAIAN AUTENTIK MATA PELAJARAN PPKn (Strategi Guru Dalam Penilaian Sikap)	2018	978-602-51150-5-9	Lab. Prodi PPKn
12.	Kewarganegaraan Indonesia dan perspektif historis dan yuridis	2018	978-602-289-421-6	Alfabeta
13.	Ilmu kewarganegaraan	2018	978-602-51150-1-1	Lab. Prodi PPKn
14.	Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi	2020	978-602-444-644-4	Bumi Aksara
15.	Civics (Ilmu Kewarganegaraan): Suatu Pengantar	2021	978-623-6000-22-9	Yuma Pressindo
16.	E-Modul Berorientasi Pembelajaran Keterampilan Kewarganegaraan Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	2021	978-623-94245-8-9	Lab. Prodi PPKn

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

17.	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	2021	978-623-94245-5-8	Lab. Prodi PPKn
18.	Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di PT	2024		Belmawa Dikti
19.	Pembelajaran PKN Isi Strategi dan Penilaian	2024		Bumi Aksara

M. PEMEROLEHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Tahun	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	Nomor HAKI
1.	2020	Karya Tulis (Artikel)	Reinforcing Civic Dispositions Through A Value Analysis Approach On Civics Education Subjects In Schools	EC00202053935
2.	2021	Buku	Buku Pengayaan Bhinneka Tunggal Ika PPKn Jenjang SMP/MTs	EC00202133485,
3.	2021	Buku	Civics (Ilmu Kewarganegaraan) : Suatu Pengantar	EC00202167027
4.	2021	Karya Rekaman Video	Video Pembelajaran Podcast Berjudul Podcast Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kelas XI BAB 6 Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia	EC00202134282
5.	2021	Program Komputer	Aplikasi Penilaian Pembelajaran Berbasis Web	EC00202157753
6.	2022	Karya Tulis (Artikel)	Implementasi Pendidikan Karakter Mahasiswa dalam Blended Learning pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UPI, UNS, dan UNP	EC00202256403

N. PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Judul Penelitian	Tahun	Posisi	Sumber dana
1.	Karakterisasi Kewarganegaraan Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Dan Hukum	2017	Ketua	Hibah Fundamental Dikti

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

2.	Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Se Solo Raya Pasca Sertifikasi	2017	Ketua	Hibah Sosial Humaniora dan Pendidikan UNS
3.	Identifikasi Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Pendekatan Saintifik di SMP Negeri Kota Surakarta	2017	Anggota	Hibah MRG
4.	Konsep Nasionalisme Gerakan Islam di Indonesia (Studi Komparasi Antara Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia)	2017	Anggota	Hibah MRG LPPM UNS
5.	Karakterisasi Kewarganegaraan Indonesia Dalam Perspektif Sejarah dan Hukum	2018 Th ke2	Ketua	PDUPT
6.	Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Se Solo Raya Pasca Sertifikasi	2018 Tahun ke-2	Ketua	Hibah Sosial Humaniora dan Pendidikan UNS
7.	Strategi Peningkatan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pengembangan Desain Instruksional Berorientasi KKNi	2018	Ketua	Penelitian Unggulan Terapan UNS
8.	Publikasi Ilmiah Riset Group Filsafat Dan Politik Peningkatan Kewarganegaraan Pada Proseding Dan Jurnal Bereputasi	2018	Ketua	PPKGR, LPPM UNS
9.	Strategi peningkatan Publikasi Ilmiah Riset Group Filsafat Dan Politik Peningkatan Kewarganegaraan Pada Proseding Dan Jurnal Internasional Bereputasi, SP3 No 516	2019	Ketua	PPKGR
10.	Strategi Peningkatan Capaian pembelajaran Mata kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan melalui	2019	Ketua	PUT UNS

	Pengembangan desain instruksional Berorientasi KKNI			
11.	Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Aplikasi	2019	Anggota	PUT UNS
12.	KONSTRUKSI PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN PPKN KAJIAN BHINEKA TUNGGAL IKA BERBASIS ISU AKTUAL	2020	Ketua	HGR
13.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penunjang Penelitian Filsafat dan Politik Kewarganegaraan Guna Pengembangan Media Digital	2020	Ketua	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penelitian (PKLP-UNS)
14.	Konstruksi Pengembangan Materi Pembelajaran PPKn Kajian UUD 1945 Berbasis Putusan Mahkamah Konstitusi	2021	Ketua	Hibah Riset Grup UNS
15.	Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah Indonesia dan Malaysia: suatu studi perbandingan	2021	Ketua	Penelitian Mandiri
16.	<u>Politik Hukum Peraturan Pencegahan Radikalisme berbasis Pancasila di Era Teknologi 4.0</u>	2021	Anggota	Penelitian Mandiri
17.	<u>Peningkatan Kualitas Penilaian Pembelajaran Melalui Pengembangan Aplikasi Berbasis Web</u>	2021	Anggota	PUT UNS
18.	Analisis Kesulitan Guru PPKn Mengembangkan Materi Pembelajaran PPKn Kajian UUD 1945 dalam kurikulum sekolah penggerak	2022	Anggota,	Hibah RG
19.	Implementasi Pendidikan Karakter Mahasiswa Dalam Blended Learning Pada Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Upi, Uns, Dan Unp	2022	Anggota	RKI
20.	Kewarganegaraan Dimensi Hukum, Sosial dan Politik dalam Kurikulum PPKn SMA di Indonesia	2022	Anggota	Mandatory Riset

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

21.	Analisis Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berdasarkan Kurikulum Merdeka Pada Tahun 2023	2023	Anggota	Penelitian Hibah Grup Riset (penelitian Hgr-uns) B
22.	Identifikasi Hasil-Hasil Riset Untuk Peningkatan Publikasi Anggota Riset Group Pembelajaran dan Pendidikan Kewarganegaraan	2024	Anggota	Penelitian Hibah Grup Riset (penelitian Hgr-uns) C

O. PENGALAMAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No	Judul Kegiatan	Tahun	Posisi	Sumber dana
1.	Pembahasan kisi kisi soal USBN PPKn SMP di MGMP PKn SMP kota Surakarta, 6 Februari 2017	2017	Ketua	MGMP PKn SMP kota Surakarta
2.	Bedah SKL PPKn SMP di MGMP PKn SMP Kab Wonogiri, 22 Februari 2017	2017	Ketua	MGMP PKn SMP kab Wonogiri
3.	TOT Inklusi kesadaran pajak dalam MKWU di Purwokerto, 18 Oktober 2017	2017	Ketua	Kerjasama dengan DJP Kanwil 2 Jateng
4.	TOT Inklusi kesadaran pajak dalam MKWU di Magelang, 21 Nopember 2017	2017	Ketua	Kerjasama dengan DJP Kanwil 2 Jateng
5.	TOT Inklusi kesadaran pajak dalam MKWU di Surakarta, 12 Desember 2017	2017	Ketua	Kerjasama dengan DJP Kanwil 2 Jateng
6.	PTK dan Penulisan Artikel bagi Guru Guru SD di Kecamatan Semin Gunung Kidul , 8 Februari 2018	2018	Ketua	Mandiri

7.	PENGEMBANGAN PRODUK OLAHAN JAGUNG, PEMBUATAN BIOPORI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Di Desa Sumberejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul	2018	Ketua	UPT KKN LPPM UNS
8.	Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan di desa Candirejo, Semin, Gunung Kidul	2018	Ketua	UPT KKN LPPM UNS
9.	Peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru PPKn SMK Solo Raya	14 Juli 2018	Ketua	Mandiri
10.	Model Penilaian Autentik berbasis Google Form bagi guru PPKn SMK kota Surakarta	28 Juli 2018	Ketua	Mandiri
11.	Penyusunan soal HOTS bagi guru PPKn SMA kab. Sragen	20 Agustus 2018	Anggota	Mandiri
12.	Pengembangan Media Pembelajaran PPKn di era milenial	4 Sept 2018	Anggota	Mandiri
13.	Peningkatan Kompetensi Guru pada era Disrupsi melalui Workshop Penyusunan E Modul ber ISBN	2019	Ketua	PKM UNS
14.	Pelatihan media pembelajaran menggunakan software Geogebra, kerjasama IGI Wng dengan FKIP UNS	23-24 Februari dan 2-3 Maret 2019	Anggota	Mandiri
15.	Pelatihan Pembuatan soal HOTS pada MGMP PPKn SMP Kota Solo	7 Oktober 2019	Ketua	Mandiri
16.	Pelatihan perangkat dan penilaian pembelajaran pada guru guru PPKn SMA kab Pekalongan	Agts 2019	Anggota	Mandiri
17.	Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Materi Pembelajaran PPKn Kajian Bhinneka Tunggal Ika Berbantuan Website	2020	Ketua	HGR
18.	<u>Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Materi Pembelajaran PPKn Kajian UUD 1945 Berbantuan Website</u>	2021	Anggota	Hibah Grup Riset
19.	Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pendidikan, Kesehatan di Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta	2021	Ketua	KKN Tematik UNS

Integrasi nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan warga Indonesia yang berkarakter

20.	Pengabdian Masyarakat Pada Situasi Pandemi Covid-19 Dengan Strategi Kolaboratif dan Pendekatan Edukatif Kepada Masyarakat Pucangsawit	2021	Ketua	KKN Tematik UNS
21.	Pelatihan Dan Pendampingan Pengembangan Materi Pembelajaran Ppkn Kajian Uud (Undang- Undang Dasar) Tahun 1945 Berbasis Putusan Mahkamah Konstitusi	2022	Anggota	Hibah RG
22.	Pendampingan Pemahaman Materi Elemen Pancasila pada Guru Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka Jenjang SMA/MA/SMK	2024	Anggota	Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri (pkm Mandiri)

P. SERTIFIKASI KOMPETENSI

	Jenis Sertifikasi Kompetensi	Tahun
1.	Dosen Profesional dengan Sertifikasi Dosen	2011
2.	Kompeten pada kualifikasi Penulisan Buku Nonfiksi	2019
3.	Kompeten sebagai Asesor dengan kualifikasi dan kompetensi sebagai Asesor Beban Kerja Dosen	2024
4.	Sertifikasi pada kualifikasi Maheswara Utama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk materi Pokok-Pokok Pikiran Pancasila	2024

Q. PENUGASAN LAIN (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Judul Kegiatan	Tahun
1.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah tamu Pancasila dan Kewarganegaraan dalam dimensi merdeka belajar, PPKn FKIP UMM	2022
2.	Menjadi narasumber dalam kegiatan FGD MBKM, PPKn FIS Universitas Negeri Malang	2022
3.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Pertukaran Dosen Ideologi Pancasila, PPKn Universitas Negeri Malang	2022
4.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Terpumpun bertema: "Pendidikan Pancasila di Kurikulum Baru, Politis atau Akademis?", P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru)	2022

5.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Sarasehan Nasional Hari Lahir Pancasila, Pancasila antara Cita dan Realita, AP3KnI Jateng	2022
6.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Webinar Pancasila sebagai dasar falsafah negara, HIMA PGSD Unnes	2022
7.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Refleksi Pendidikan Akhir Tahun, Filsafat Pendidikan Pancasila masih adakah, AP3KnI Jateng	2022
8.	Menjadi narasumber dalam kegiatan FGD Program MBKM Antar Program Studi, PPKn FIS Unnes	2022
9.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional Forum Prodi PPKn Se Jateng DIY dan Jatim, PPKn Universitas PGRI Semarang	2023
10.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion Impelementasi MBKM di PTN BH Prodi PPKN FIS Unnes	2023
11.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah umum tamu Pembelajaran PPKn berbasis PBL dan PjBL	2023
12.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Diklat Analisis Capaian Pembelajaran pada Mapel Pendidikan Pancasila jenjang SMP, MGMP PPKn SMP Kab, Pacitan	2024
13.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar nasional Ap3KnI Jateng, Penguatan Pendidikan Pancasila untuk masa depan bangsa, AP3KnI Jateng	2024
14.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kuliah Umum perihal Civic Education di Indonesia, STKIP Arrahmaniyah Depok	2024
15.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah tamu Transformasi Civic Education dalam menyiapkan warga negara kompeten dan global, PPKn FKIP Universitas Lampung	2024
16.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Kurikulum Prodi S1 PPKn untuk akreditasi Internasional, PPKn FKIP Universitas Mulawarman	2024
17.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Kurikulum Prodi S1 PPKn berbasis OBE, PPKn FIS UNP Padang	2024
18.	Menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan dosen MKWK, Nilai dan Norma Konstitusi dan Konstitusioanalitas sebagai materi PKn PT, Fak Filsafat UGM bekerjasama dengan AKD MKWK	2024

R. PENGALAMAN KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

	Negara yang dituju	Tujuan Kunjungan	Tahun
1.	Malaysia	International Conference	2010
2.	Singapura	International Conference	2010, 2016
3.	Malaysia	International Conference	2016, 2019
4.	Malaysia	International Conference	2022

S. PENGALAMAN ORGANISASI PROFESI

No.	Posisi	Tahun
1.	Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)	2012- sekarang
2.	ISPI: Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia	2016- sekarang
3.	Forum Dosen dan Kelembagaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum Seluruh Indonesia	2020- sekarang

T. TANDA JASA / PENGHARGAAN

No.	Nama Bintang / Satya lencana penghargaan	Tahun perolehan	Nama Negara / Instansi yang memberi
1.	Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	2015	Presiden Republik Indonesia
2.	Penghargaan Kepala Prodi Berprestasi	2016	Dekan FKIP UNS
3.	Tokoh edukatif program inklusi kesadaran pajak	2019	Direktur Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
4	Penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	2024	Presiden Republik Indonesia